

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT

2017

KABUPATEN SIAK



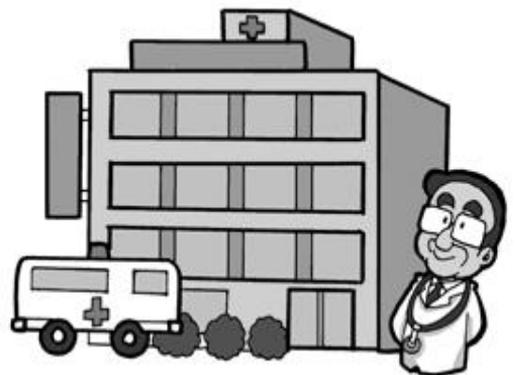
hospital



INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT

KABUPATEN SIK

2017



hospital

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KABUPATEN SIAK 2017

ISSN : Belum Tersedia
No. Publikasi : 14050.1819
Katalog BPS : 4102004.14
Ukuran Buku : 17,6 cm x 25 cm
Jumlah Halaman : xii+ 64 halaman

Naskah :
Badan Pusat Statistik Kabupaten Siak

Penyunting:
Badan Pusat Statistik Kabupaten Siak

Gambar Kulit :
Badan Pusat Statistik Kabupaten Siak

Diterbitkan Oleh :
© Badan Pusat Statistik Kabupaten Siak

Dicetak Oleh :
CV. M&N Grafika

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau mengandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik Provinsi Riau

KATA PENGANTAR

Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Siak 2017 merupakan publikasi tahunan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Siak yang menyajikan tingkat perkembangan kesejahteraan rakyat di Kabupaten Siak antar waktu dan perbandingannya baik antar kecamatan maupun daerah tempat tinggal (perkotaan dan perdesaan/*urban-rural*). Data yang digunakan adalah data BPS yang bersumber dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), dan Proyeksi Penduduk Provinsi Riau 2010-2020.

Publikasi ini menyajikan berbagai aspek kesejahteraan yang datanya tersedia dan terukur. Untuk memudahkan interpretasi, perubahan taraf kesejahteraan dikaji menurut enam bidang yang mencakup Kependudukan, Kesehatan dan Gizi, Pendidikan, Ketenagakerjaan, Taraf dan Pola Konsumsi, serta Perumahan dan Lingkungan yang menjadi acuan dalam upaya peningkatan kualitas hidup.

Kami memberikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang berpartisipasi dalam penyusunan publikasi ini. Akhirnya, kami mengharapkan kritik dan saran demi perbaikan publikasi serupa di masa mendatang.

Siak Sri Indrapura, November 2018
Kepala Badan Pusat Statistik
Kabupaten Siak



RAFDI, SST

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	v
Daftar Isi.....	vii
Daftar Tabel.....	viii
Daftar Gambar	x
Singkatan dan Akronim	xi
1. Kependudukan	3
2. Kesehatan dan Gizi	17
3. Pendidikan	27
4. Ketenagakerjaan	39
5. Taraf dan Pola Konsumsi	47
6. Perumahan dan Lingkungan	53
Daftar Pustaka	61
Istilah Teknis.....	62

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 1.1	Jumlah, Laju Pertumbuhan Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin di Kabupaten Siak, 2013-2017	5
Tabel 1.2	Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan, 2013-2017	7
Tabel 1.3	Komposisi Penduduk (%) dan Angka Beban Ketergantungan, di Kabupaten Siak, 2013-2017	8
Tabel 1.4	Persentase Perempuan Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Kawin Menurut Status Penggunaan Alat/Cara KB di Kabupaten Siak, Tahun 2016 dan 2017	13
Tabel 1.5	Persentase Wanita Berumur 15-49 Tahun dan Berstatus Kawin yang sedang Menggunakan Alat/Cara Kontrasepsi Menurut Jenis Alat/Cara KB, di Kabupaten Siak, Tahun 2016-2017	14
Tabel 2.1	Persentase Penduduk yang Menderita Sakit Selama Bulan Terakhir dan Jumlah Hari Sakit di Kabupaten Siak, Tahun 2016-2017	19
Tabel 2.2	Persentase Anak Berumur Kurang dari 2 Tahun yang Pernah Diberi ASI di Kabupaten Siak, Tahun 2016 dan 2017	21
Tabel 2.3	Persentase Anak Umur 0-59 Bulan yang Pernah Diimunisasi Menurut Jenis Imunisasi, di Kabupaten Siak, Tahun 2016 dan 2017	22
Tabel 2.4	Persentase Penduduk yang Berobat Jalan Selama Sebulan Terakhir Menurut Tempat Berobat di Kabupaten Siak, 2016 dan 2017	24
Tabel 3.1	Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas Menurut Ijazah/STTB Tertinggi yang Dimiliki di Kabupaten Siak Tahun 2016-2017	32

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 3.2	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Menurut Kelompok Umur di Kabupaten Siak, Tahun 2015- 2017	34
Tabel 3.3	Angka Partisipasi Murni (APM) Penduduk Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Siak, Tahun 2016-2017	36
Tabel 4.1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Daerah Tempat Tinggal Di Kabupaten Siak, Tahun 2015-2017	41
Tabel 4.2	Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama di Kabupaten Siak, 2015 dan 2017	42
Tabel 4.3	Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan di Kabupaten Siak, 2015 dan 2017	43
Tabel 5.1	Rata-Rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut Jenis Pengeluaran di Kabupaten Siak, Tahun 2016 dan 2017	48
Tabel 5.2	Rata-Rata Pengeluaran per Kapita/bulan Menurut Golongan Pengeluaran (Rupiah) di Kabupaten Siak, 2016 dan 2017	49
Tabel 6.1	Rumah Tangga Menurut Beberapa Indikator Kualitas Perumahan Di Kabupaten Siak, Tahun 2016 dan 2017	55
Tabel 6.2	Persentase Rumah Tangga Menurut Beberapa Fasilitas Perumahan, Di Kabupaten Siak, 2016 dan 2017	57
Tabel 6.3	Persentase Rumah Tangga Menurut Beberapa Fasilitas Perumahan, Di Kabupaten Siak, 2016 dan 2017	59

DAFTAR GAMBAR

		Halaman
Gambar 1.1	Rasio Jenis Kelamin di Kabupaten Siak , 2013-2017	5
Gambar 1.2	Persentase Wanita 10 + tahun pernah kawin Menurut Usia Perkawinan Pertama di Kabupaten Siak, Tahun 2017	11
Gambar 2.1	Angka Harapan Hidup di Kabupaten Siak, Tahun 2010-2017	18
Gambar 3.1	Rata-rata Lama Sekolah (tahun) di Kabupaten Siak Tahun 2010-2017	31
Gambar 3.2	Persentase Penduduk 7 -24 Tahun ke Atas Menurut Status Pendidikan di Kabupaten Siak, Tahun 2017	33
Gambar 5.1	Persentase Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut Jenis Pengeluaran di Kabupaten Siak Tahun 2016 dan 2017	49

SINGKATAN DAN AKRONIM

AKB	Angka Kematian Bayi
APM	Angka Partisipasi Murni
APS	Angka Partisipasi Sekolah
ASI	Air Susu Ibu
BLT	Bantuan Langsung Tunai
BPS	Badan Pusat Statistik
KB	Keluarga Berencana
Raskin	Beras Miskin
Sakernas	Survei Angkatan Kerja Nasional
SDKI	Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia
SD	Sekolah Dasar
SM	Sekolah Menengah
SMP	Sekolah Menengah Pertama
SP	Sensus Penduduk
SUPAS	Survei Penduduk Antar Sensus
Susenas	Survei Sosial Ekonomi Nasional
TPAK	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
TPT	Tingkat Pengangguran Terbuka

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT 2017

Kependudukan

Kesehatan dan Gizi

Pendidikan

Ketenagakerjaan

Taraf dan Pola Konsumsi

Perumahan dan Lingkungan

Bab
1

Total Penduduk
Kabupaten Siak 2017
465.414



Laju Pertumbuhan
Penduduk (%)

2,73

Rasio Jenis Kelamin (Sex Ratio)



Laki-Laki



Perempuan

105,41

Angka Beban Tanggungan
Penduduk

54,05 %



1. KEPENDUDUKAN

*S*u kependudukan yang kian mengemuka belakangan ini berkaitan dengan pertumbuhan penduduk. Penduduk memang dapat menjadi modal dasar dalam pembangunan, namun di sisi lain penduduk juga dapat menjadi hambatan dalam mencapai tujuan pembangunan. Hal ini dimungkinkan terjadi apabila pertumbuhan jumlah penduduk tidak terkendali dan tidak diimbangi dengan pemenuhan kebutuhan penduduk seperti sandang, pangan, papan, dan kebutuhan akan pendidikan dan kesehatan yang layak.

Pemenuhan kebutuhan hidup yang tidak terpenuhi dikhawatirkan akan menimbulkan berbagai masalah yang dapat mengganggu kesejahteraan penduduk. Penyediaan pangan yang tidak mencukupi dapat menimbulkan terjadinya kelaparan dan dapat meningkatkan jumlah kematian penduduk. Selain itu, ketersediaan pemukiman yang tidak mencukupi dapat mengakibatkan munculnya pemukiman-pemukiman liar, kumuh dan tidak layak akibat sempitnya lahan untuk pemukiman seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk. Masalah lain yang dapat muncul diantaranya terjadinya gangguan keamanan akibat maraknya aksi tindakan kriminalitas, menurunnya tingkat kesehatan masyarakat akibat sarana kesehatan yang kurang memadai, dan rendahnya kualitas sumber daya manusia terkait dengan sarana pendidikan yang terbatas.

Selain tingkat pertumbuhan penduduk, masalah komposisi penduduk dan ketimpangan distribusi penduduk juga menjadi masalah serius yang harus segera ditangani oleh pemerintah. Kebijakan pemerintah terkait masalah kependudukan baik dalam hal kuantitas maupun kualitas penduduk harus terus dilaksanakan dalam upaya memperbaiki kualitas hidup masyarakat sehingga kesejahteraan hidup masyarakat dapat diingkatkan.

Jumlah, Laju Pertumbuhan Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin

Salah satu masalah klasik kependudukan yang terjadi di Provinsi Riau dan terus menjadi perhatian pemerintah adalah jumlah penduduk yang besar, termasuk di Kabupaten Siak . Saat ini jumlah penduduk di Kabupaten Siak pada tahun 2017 berdasarkan penghitungan Proyeksi Penduduk 2010-2020 tercatat sebanyak 465.414 jiwa yang terdiri dari 283.225 jiwa penduduk laki-laki dan 268.458 jiwa penduduk perempuan. Jumlah penduduk tersebut mengalami kenaikan sekitar 12,4 ribu jiwa bila dibandingkan dengan jumlah penduduk tahun 2016 yang mencapai 453.052 jiwa yang terdiri dari 232.553 jiwa penduduk laki-laki dan 220.449 jiwa penduduk perempuan. Bila dibandingkan dengan empat tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2013, jumlah penduduk di Kabupaten Siak saat ini mengalami peningkatan sekitar 11,80 persen. Dengan kata lain, selama kurun waktu empat tahun terakhir jumlah penduduk Kabupaten Siak telah mengalami penambahan penduduk sebesar 49,12 ribu jiwa. Dilihat dari laju pertumbuhan penduduk tiap tahunnya, laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Siak pada tahun 2017 tercatat sebesar 2,73 persen atau mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

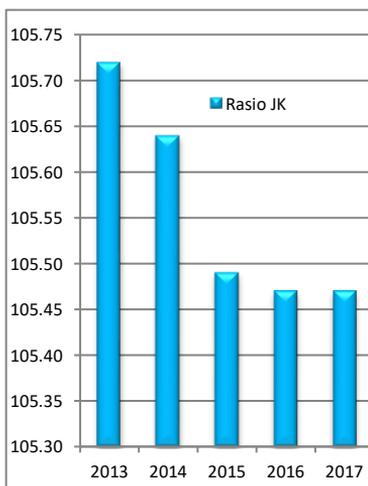
Tabel 1.1 Jumlah, Laju Pertumbuhan Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin di Kabupaten Siak, 2013-2017

Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Laju Pertumbuhan Penduduk per tahun (%)	Rasio Jenis Kelamin
(1)	(2)	(3)	(4)
2013	416.298		105,72
2014	428.499	2,93	105,64
2015	440.841	2,88	105,49
2016	453.052	2,77	105,47
2017	465.414	2,73	105,41

(Sumber : Proveksi Penduduk Tahun 2010-2020)

Pada tahun 2015, laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Siak sebesar 2,88 persen dan mengalami penurunan menjadi 2,77 persen pada tahun 2016 dan 2,73 persen pada tahun 2017. Hal ini dapat menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah dalam hal pengendalian pertumbuhan penduduk di Kabupaten Siak telah menunjukkan arah menuju adanya keberhasilan.

Gambar 1.1. Rasio Jenis Kelamin di Kabupaten Siak , 2013-2017



Dilihat berdasarkan kecamatan, pada periode 2016-2017 laju pertumbuhan penduduk di 14 kecamatan ada beberapa yang berada di atas laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Siak. Laju pertumbuhan penduduk tertinggi berada di Kecamatan Sungai Mandau (3,21persen), diikuti Kecamatan Kandis (3,10 persen), dan Kecamatan Siak (3,04 persen). Sementara itu, kecamatan yang mengalami laju pertumbuhan penduduk di bawah angka kabupaten adalah Kecamatan Pusako (2,08 persen), diikuti Kecamatan Sungai Apit (2,27 persen) dan Kecamatan Koto Gasib (2,50 persen). Berdasarkan laju pertumbuhan tersebut, perlu menjadi perhatian dari pemerintah bahwa angka pertumbuhan penduduk di Kabupaten Siak tidak homogen.

Hal ini menunjukkan adanya disparitas angka pertumbuhan menurut kecamatan dan kemungkinan adanya perbedaan atau disparitas dalam konteks kebijakan kependudukan. Bila dilihat komposisi penduduk menurut jenis kelamin penduduk laki-laki dan perempuan, di Kabupaten Siak, rasio jenis kelamin penduduk Kabupaten Siak pada tahun 2017 sebesar 105,41. Ini berarti bahwa dari setiap 100 penduduk perempuan ada sebanyak 105 penduduk laki-laki. Dengan kata lain, jumlah penduduk laki-laki di Kabupaten Siak lebih banyak daripada jumlah penduduk perempuan. Rasio jenis kelamin menurut kecamatan di Kabupaten Siak, sebagian besar hampir sama di kisaran 104 – 106 dan terjadi pada 5 tahun terakhir ini.

Persebaran dan Kepadatan Penduduk

Salah satu persoalan yang terkait dengan kependudukan yang masih harus dihadapi nasional dan juga di Kabupaten Siak adalah masalah ketimpangan distribusi penduduk. Ketimpangan distribusi penduduk terjadi di desa dan kota. Distribusi penduduk yang tidak merata menimbulkan masalah pada kepadatan penduduk dan tekanan penduduk di suatu wilayah. Ada beberapa wilayah yang mempunyai jumlah penduduk yang sangat besar, di wilayah lain masih ada wilayah yang hanya dihuni oleh jumlah penduduk yang relatif sedikit. Hal ini sangat berpengaruh pada kondisi masyarakat setempat.

Di satu sisi, wilayah dengan jumlah penduduk yang besar akan dihadapkan pada persoalan meningkatnya jumlah pengangguran karena tidak memadainya penyediaan lapangan pekerjaan, permasalahan kebutuhan lahan untuk pemukiman, serta tidak memadainya akses fasilitas pendidikan dan kesehatan serta masalah-masalah sosial lainnya.

Di sisi lainnya, wilayah dengan dengan jumlah penduduk yang relatif sedikit akan memunculkan persoalan optimalisasi sumber daya alam terkait dengan kekurangan tenaga kerja padahal wilayah tersebut memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah.

Tabel 1.2 Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan, 2013-2017

Kecamatan	Luas Wilayah	% Luas Wilayah	Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)				
			2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Minas	346,35	4,05	83	85	88	90	93
Sungai Mandau	1.705,00	19,93	5	5	5	5	5
Kandis	1.493,65	17,46	43	44	46	47	49
Siak	894,17	10,45	27	28	29	30	31
Kerinci Kanan	128,66	1,50	196	201	207	212	217
Tualang	343,60	4,02	335	344	354	363	373
Dayun	232,24	2,71	126	129	133	136	140
Lubuk Dalam	155,09	1,81	121	125	128	132	135
Koto Gasib	704,70	8,24	29	30	31	31	32
Mempura	437,45	5,11	36	37	38	39	40
Sungai Apit	1.346,33	15,74	20	21	21	22	22
Bunga Raya	151,00	1,76	154	159	163	168	173
Sabak Auh	73,38	0,86	147	151	155	159	163
Pusako	544,47	6,36	10	10	11	11	11
Jumlah	8.556,09	100,00	49	50	52	53	54

[Sumber : Proveksi Penduduk Tahun 2010-2020]

Dilihat berdasarkan kecamatan, pada tahun 2017 kepadatan penduduk di 14 kecamatan sangat tidak homogen. Ada beberapa kecamatan yang penduduknya sangat padat dan ada juga kecamatan yang penduduknya sangat sepi. Kepadatan penduduk Kabupaten Siak tahun 2017 adalah 54 jiwa per km².

Angka ini mengalami peningkatan yang relatif kecil jika dibanding kondisi tahun 2016 yang kepadatan penduduknya masih berada pada poin 53 jiwa per km². Jumlah kepadatan penduduk tertinggi berada di Kecamatan Tualang dan Kecamatan Kerinci Kanan. Sementara itu, kecamatan yang kepadatan penduduknya rendah adalah Kecamatan Pusako dan Kecamatan Sungai Mandau.

Angka Beban Ketergantungan

Angka Beban Ketergantungan (*Dependency ratio*) merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tinggi persentase angka beban ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif (kelompok umur 15-64 tahun) untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif (kelompok umur 0-14 tahun) dan tidak produktif lagi (kelompok umur 65 tahun keatas). Sedangkan persentase angka beban ketergantungan yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Tabel 1.3 Komposisi Penduduk (%) dan Angka Beban Ketergantungan, Di Kabupaten Siak, 2013-2017

Tahun	0-14 tahun	15-64 tahun	65 + tahun	Angka Beban Ketergantungan (jiwa)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2013	34,08	64,11	1,81	55,98
2014	33,82	64,32	1,87	55,48
2015	33,56	64,51	1,93	55,01
2016	33,28	64,71	2,01	54,53
2017	32,99	64,91	2,09	54,05

[Sumber : Proeksi Penduduk Tahun 2010-2020]

Dampak keberhasilan pembangunan kependudukan juga dapat dilihat pada perubahan komposisi penduduk menurut umur seperti tercermin pada semakin rendahnya angka beban ketergantungan. Hal ini disebabkan dengan semakin kecilnya angka beban ketergantungan akan memberikan kesempatan yang semakin besar bagi penduduk usia produktif untuk meningkatkan kualitas dirinya.

Selama periode 2013-2017 angka beban ketergantungan setiap tahun cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2016 angka beban tanggungan di Kabupaten Siak sebesar 54,53 persen. Hal ini berarti bahwa dari 100 penduduk usia produktif menanggung sekitar 54 penduduk usia belum/ tidak produktif. Pada tahun 2017 angka beban tanggungan penduduk turun menjadi 54,05 persen artinya, setiap 100 penduduk produktif masih menanggung beban 54 penduduk belum/tidak produktif.

Rasio ketergantungan yang terus cenderung menurun belakangan ini diperkirakan akan mencapai titik terendah pada periode 2020-2030. Pada periode itu akan terdapat peluang lebih besar untuk melakukan investasi manusia guna mendorong produksi. Namun perlu diketahui bahwa di satu sisi mereka dapat mendorong ekonomi untuk tumbuh jika sebagian besar dari mereka bekerja tetapi di sisi lain mereka dapat menciptakan instabilitas sosial dan politik jika diantara mereka banyak yang mereka tidak bekerja. Mereka dikatakan usia produktif tapi tidak dapat memanfaatkan tenaganya karena tidak terserap di pasar kerja.

Menurunnya angka beban ketergantungan diikuti pula dengan menurunnya proporsi penduduk usia muda (0-14 tahun) sebagai dampak dari menurunnya laju pertumbuhan penduduk. Pada tahun 2016 ada sebanyak 33,28 persen penduduk yang berusia muda (0-14 tahun) dan turun menjadi 33,99 persen pada tahun 2017. Struktur umur penduduk Kabupaten Siak masih didominasi oleh penduduk usia produktif yang berdasarkan Proyeksi Penduduk 2010-2020 mencapai 64,71 persen pada tahun 2016 dan kemudian meningkat pada tahun 2017 menjadi sebesar 64,91 persen. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk usia produktif di Kabupaten Siak menjadi sangat potensial sebagai modal dasar yang besar untuk pembangunan. Sementara itu, proporsi penduduk usia lanjut (65 tahun ke atas) semakin bertambah dari 2,01 persen pada tahun 2016 menjadi 2,09 persen pada tahun 2017.

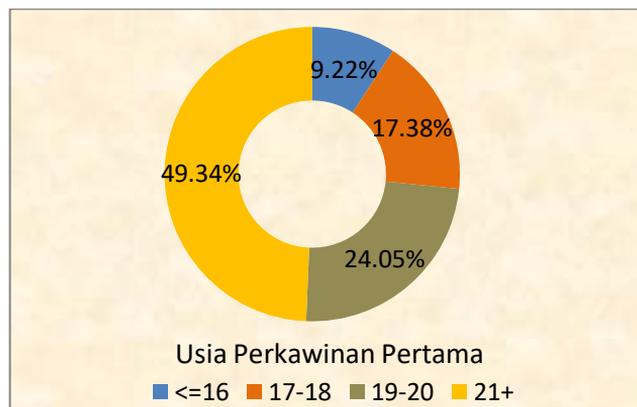
Wanita Menurut Usia Perkawinan Pertama

Kelahiran (fertilitas) merupakan salah satu faktor yang dapat memengaruhi besarnya penduduk di suatu wilayah selain kematian (mortalitas) dan perpindahan penduduk (mobilitas). Angka fertilitas yang tinggi apabila disertai angka mortalitas yang rendah akan menyebabkan penambahan penduduk yang meningkat. Apabila angka fertilitas tidak dapat terkendali maka akan menyebabkan terjadinya ledakan penduduk sehingga menyebabkan jumlah penduduk semakin membengkak dan memicu berbagai macam permasalahan penduduk di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Di samping itu, ledakan penduduk yang terjadi akan menjadi beban negara semakin besar dan beresiko menghambat pembangunan nasional.

Angka fertilitas yang tidak dapat terkendali akan menyebabkan terjadinya ledakan penduduk dan memicu berbagai macam permasalahan penduduk di tengah-tengah kehidupan masyarakat.

Salah satu persoalan penduduk yang dapat memicu tingginya pertumbuhan jumlah penduduk yaitu tingginya angka kelahiran di suatu daerah. Banyaknya kelahiran yang terjadi pada seorang wanita dapat dipengaruhi oleh masa reproduksinya. Semakin panjang masa reproduksi seorang wanita, kemungkinan semakin banyak anak yang dilahirkan. Semakin muda usia seseorang saat melaksanakan perkawinan pertama maka akan semakin panjang masa reproduksinya. Terdapat beberapa sumber mengenai batasan usia minimal seorang wanita untuk melakukan perkawinan pertama, diantaranya sebagai berikut: Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pada pasal 7 ayat (1), syarat menikah untuk perempuan harus sudah berusia minimal 16 tahun. Sedangkan menurut Undang-Undang Perlindungan Anak usia minimal untuk menikah yaitu sudah berumur 18 tahun. Sementara itu, menurut Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) usia pernikahan pertama bagi seseorang idealnya adalah 21-25 tahun.

Gambar 1.2 Persentase Wanita 10 + tahun pernah kawin Menurut Usia Perkawinan Pertama di Kabupaten Siak, Tahun 2017



Sumber: Susenas 2017

Persentase wanita umur 10 tahun ke atas di Kabupaten Siak yang melakukan perkawinan pertamanya di usia 10-16 tahun sebesar 6,98 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat mengenai usia ideal untuk melakukan perkawinan pertama masih perlu ditingkatkan. Pada usia 10-16 tahun, seseorang masih dapat dikatakan sebagai anak-anak yang belum siap untuk membina sebuah keluarga. Terlebih lagi, usia 10-16 tahun seharusnya adalah usia ketika mereka sedang duduk di bangku SD/Sederajat atau SMP/Sederajat. Sebagian besar wanita Kabupaten Siak melakukan perkawinan pertama pada usia 21 tahun ke atas. Sementara itu, wanita yang melakukan perkawinan pertama pada usia 17-18 tahun juga terbilang relatif cukup tinggi, pada tahun 2017 mencapai 17,38 persen.

Penggunaan Alat/Cara KB

Program Keluarga Berencana (KB) merupakan salah satu program pemerintah yang bertujuan untuk menekan laju pertumbuhan penduduk, mengurangi angka kelahiran anak dan kematian ibu. Program KB dilakukan dengan penggunaan alat kontrasepsi/KB yang berbagai jenis/macamnya.

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) selaku instansi pemerintah yang menangani program KB ini mengharapkan cakupan akseptor KB terus meningkat. Terutama untuk kepesertaan KB dengan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) seperti IUD dan Implant. Dengan cakupan KB yang meningkat, diharapkan laju pertumbuhan penduduk bias dikendalikan lebih baik lagi. Lambatnya kenaikan angka cakupan ber-KB dipicu oleh beberapa faktor. Utamanya adalah masih tingginya kelompok yang tidak terlayani program KB (*unmet need*) dengan berbagai alasan dan kendala.

Selain itu adalah makin kecilnya akseptor KB yang memiliki KB dengan metode jangka panjang, sehingga angka *drop out* KB menjadi tinggi. Berdasarkan hasil Susenas tahun 2016-2017, persentase wanita berumur 15-49 tahun yang berstatus kawin yang pernah/sedang menggunakan alat/cara KB sudah mencapai di atas 60 persen yaitu masing masing sebesar 73,39 persen pada tahun 2016 dan 70,28 persen pada tahun 2017.

Tabel 1.4 .Persentase Perempuan Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Kawin Menurut Status Penggunaan Alat/Cara KB di Kabupaten Siak, Tahun 2016 dan 2017

Status Penggunaan Alat/Cara KB	Tahun	
	2016	2017
(1)	(2)	(3)
Ya, Pernah	18,14	18,87
Ya, Sedang	55,25	51,41
Tidak Pernah Menggunakan	26,60	29,72
Jumlah	100	100

[Diolah dari Hasil Susenas 2016-2017]

Berdasarkan masa kerjanya, kontrasepsi dibedakan menjadi dua kelompok yaitu sementara (*reversible*) dan permanen. Pilihan kontrasepsi untuk menunda kehamilan pertama dan mengatur jarak kehamilan adalah kontrasepsi yang memiliki masa kerja bersifat sementara, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Seseorang mempunyai pilihan untuk menggunakan jenis alat/cara KB tertentu dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain faktor keamanan, frekuensi pemakaian dan efek samping, terjangkau harganya, cara penggunaan yang dianggap paling praktis, efisien, minim resiko kegagalan dan resiko efek samping terhadap kesehatan pemakaian dan memberikan kenyamanan bagi penggunanya.

Tabel 1.5 memperlihatkan bahwa dari berbagai macam alat/cara KB yang digunakan, suntikan dan pil yang paling banyak diminati. Pada tahun 2016 penggunaan suntikan mencapai 55,56 persen dan menurun menjadi 51,02 persen pada tahun 2017. Sementara itu, penggunaan IUD/spiral dan tubektomi/vasektomi justru mengalami peningkatan dari 3,78 persen dan 3,9 persen pada tahun 2016 menjadi 5,96 persen dan 5,38 persen pada tahun 2017.

Jenis alat/cara KB yang sedikit penggunaannya adalah susuk KB/norplan/implanon/alwalit dan kondom/karet KB, masing-masing persentasenya 4 persen.

Tabel 1.5 Persentase Wanita Berumur 15-49 Tahun dan Berstatus Kawin yang sedang Menggunakan Alat/Cara Kontrasepsi Menurut Jenis Alat/Cara KB, di Kabupaten Siak, Tahun 2016-2017

Alat/Cara Kontrasepsi	Tahun	
	2016	2017
(1)	(2)	(3)
MOW/ tubektomi/MOP/ vasektomi	3,78	5,96
AKDR/IUD/ spiral	3,9	5,38
Suntikan KB	55,56	51,02
Susuk KB/ norplan/ implanon/ alwalit	4,57	3,78
Pil KB	24,79	22,81
Kondom/ karet KB	3,77	2,59
Pantang Berkala	2,47	4,62
Lainnya	1,15	3,83

[Diolah dari Hasil Susenas 2016-2017]

Bab 2

KESEHATAN DAN GIZI

“Selama 5 Tahun Terakhir
Angka Harapan Hidup selalu
Meningkat”



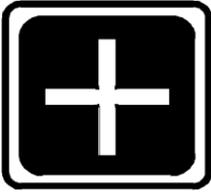
Morbiditas
“Penduduk Sakit yang
memiliki keluhan
kesehatan sampai
mengganggu kegiatan
sehari-hari”

Angka Morbiditas = 11,66 %



“Penduduk yang berobat ke
dokter/bidan

47,46 %



2. KESEHATAN DAN GIZI

Tingkat kesehatan merupakan indikator penting untuk menggambarkan mutu pembangunan manusia di suatu wilayah.

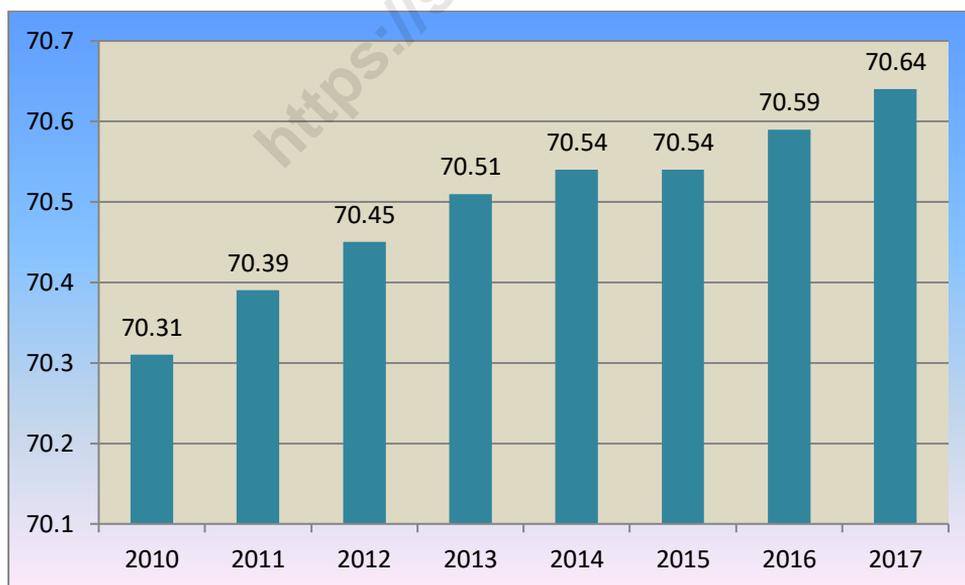
Semakin sehat kondisi suatu masyarakat, maka akan semakin mendukung proses dan dinamika pembangunan ekonomi suatu negara/wilayah semakin baik, khususnya dalam meningkatkan tingkat produktivitas. Berkaitan dengan pembangunan kesehatan, pemerintah sudah melakukan berbagai program kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat khususnya memberikan kemudahan akses pelayanan publik bidang kesehatan seperti puskesmas yang sasaran utamanya menurunkan tingkat angka kesakitan masyarakat, menurunkan Angka Kematian Ibu dan Bayi, menurunkan prevalensi gizi buruk dan gizi kurang dan meningkatkan Angka Harapan Hidup.

Upaya Pemerintah melalui program-program pembangunan yang telah dilakukan diantaranya meningkatkan akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu dan berkualitas, merata serta terjangkau, yaitu dengan memberikan pelayanan kesehatan gratis bagi penduduk miskin; menyediakan sumber daya kesehatan yang kompeten dan mendistribusikan tenaga kesehatan secara merata ke seluruh wilayah, meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan melalui pembangunan puskesmas, rumah sakit; polindes dan posyandu serta menyediakan obat-obatan yang terjangkau oleh masyarakat.

Derajat dan Status Kesehatan Penduduk

Generasi yang sehat secara fisik dan mental merupakan aset bagi pembangunan bangsa. Dari mereka nantinya akan lahir pemimpin-pemimpin yang berkualitas di masa depan. Memastikan kesehatan yang lebih baik merupakan fokus utama dalam pembangunan di setiap negara. Kesehatan anak-anak, khususnya bayi perlu diperhatikan karena mereka sangat rentan terhadap berbagai macam penyakit menular dan kekurangan gizi yang dapat mengakibatkan kematian. Semakin membaiknya kondisi kesehatan masyarakat di Kabupaten Siak telah diiringi dengan peningkatan Angka harapan hidup. Angka harapan hidup pada tahun 2010 tercatat 70,31 tahun kemudian tahun 2017 menjadi 70,64 tahun.

Gambar 2.1 Angka Harapan Hidup di Kabupaten Siak, Tahun 2010-2017



Sumber: BPS Provinsi Riau

Pemerintah sudah melakukan berbagai program kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat khususnya memberikan kemudahan akses pelayanan publik bidang kesehatan.

Merujuk pada konsep yang diterapkan oleh BPS dalam Susenas, maka Morbiditas (angka kesakitan) menunjukkan adanya gangguan/ keluhan kesehatan yang mengakibatkan terganggunya aktivitas sehari-hari baik dalam melakukan pekerjaan, berse-kolah, mengurus rumah tangga maupun melakukan aktivitas lainnya. Pada umumnya keluhan kesehatan yang mengindikasikan adanya suatu penyakit yang biasa dialami oleh penduduk adalah panas, batuk, pilek, asma/napas sesak, diare, sakit kepala berulang, sakit gigi, campak, dll. Semakin banyak penduduk yang mengalami gangguan kesehatan berarti semakin rendah derajat kesehatan di wilayah tersebut dan menunjukkan angka kesakitan yang tinggi di wilayah tersebut (penduduknya banyak yang mengalami sakit).

Tabel 2.1 Persentase Penduduk yang Menderita Sakit Selama Bulan Terakhir dan Jumlah Hari Sakit di Kabupaten Siak, Tahun 2016-2017

Jumlah Hari Sakit	Tahun	
	2016	2017
(1)	(3)	(3)
≤ 3	60,32	64,79
4-7	28,83	27,97
8-14	6,42	3,09
15-21	2,74	0,70
22-30	1,69	3,45

[Diolah dari Hasil Susenas]

Hasil Susenas tahun 2017 menunjukkan Angka Kesakitan penduduk Siak mencapai 11,66 persen, mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yang mencapai 39,21 persen. Lamanya sakit merupakan salah satu indikator yang memberikan gambaran mengenai kondisi keluhan kesehatan yang dirasakan oleh penduduk suatu wilayah.

Menurunnya angka morbiditas pada tahun 2017 dapat dikatakan sebagai kondisi kesehatan penduduk yang lebih baik, jika diikuti dengan menurunnya rata-rata lama sakit penduduk. Hasil Susenas tahun 2016 dan 2017 rata-rata lama sakit penduduk berada pada kisaran 4 hari. Semakin lamanya kesakitan (jumlah rata-rata hari sakitnya banyak), maka keluhan kesehatan suatu penyakit yang dialami penduduk dapat diasumsikan cukup serius dan dapat mempengaruhi tingkat produktivitas penduduk.

Tingkat Imunitas dan Gizi Balita

Ibu yang sedang mengandung harus mulai memperhatikan asupan yang dimakannya dan juga harus melakukan imunisasi, karena hal tersebut merupakan gizi dan imunisasi awal seorang anak dimulai. Kemudian dilanjutkan setelah sang anak lahir dengan memberikan Air Susu Ibu (ASI) sangat dianjurkan untuk diberikan ke pada bayi, karena ASI merupakan makanan pertama bayi yang memiliki peranan penting dalam proses tumbuh kembang anak.

ASI memiliki manfaat sangat besar untuk jangka panjang, karena ASI adalah nutrisi terbaik dan terlengkap, mengandung protein dan zat-zat gizi berkualitas tinggi serta mengandung zat antibodi yang berguna untuk pertumbuhan dan perkembangan kecerdasan bayi, dan melindungi tubuh bayi dari alergi dan diare serta penyakit infeksi lainnya. Oleh sebab itu pemerintah menganjurkan agar seorang ibu dapat memberikan ASI eksklusif kepada bayi sejak dilahirkan sampai 6 bulan ke depan, dan menambahkan atau mengganti dengan makanan minuman lain. Selanjutnya setelah bayi berusia 6 bulan keatas dilanjutkan bersama dengan makanan tambahan dan ASI tetap diberikan hingga usia 2 tahun.

**Tabel 2.2 Persentase Anak Berumur Kurang dari 2 Tahun
yang Pernah Diberi ASI di Kabupaten Siak, Tahun 2016 dan 2017**

Lamanya Diberi ASI (bulan)	Tahun	
	2016	2017
(1)	(2)	(3)
<12	55,37	56,36
12 - 15	19,37	24,37
16 - 19	10,31	8,05
20 - 23	14,94	11,23
Jumlah	100.00	100.00

Sumber : Susenas 2016 dan 2017

Hasil Susenas 2017 menunjukkan bahwa anak baduta (bawah 2 tahun) di Kabupaten Siak yang pernah diberi ASI ada sebanyak 98,51 persen dan relatif meningkat dari tahun 2016 yaitu sebesar 97,63 persen. Seorang ibu dianjurkan dapat menyusui bayinya selama 2 tahun, karena semakin lama bayi mendapatkan ASI akan memberikan kekebalan/imunitas yang lebih kuat. Bila dilihat rata-rata lama pemberian ASI anak baduta di Kabupaten Siak pada tahun 2016-2017, hanya sampai bayi usia 10 bulan saja. Pada tahun 2017, sebanyak 56,36 persen bayi berusia dibawah satu tahun pernah diberi ASI. Hal ini setidaknya perlu menjadi perhatian bagi pemerintah untuk lebih giat mensosialisasikan peranan ASI terhadap tumbuh kembangnya anak baduta.

Selain ASI, imunisasi sangat diperlukan bagi perkembangan dan peningkatan kekebalan daya tahan tubuh balita agar sistem pertahanan tubuhnya kuat terhadap suatu penyakit. Jenis imunisasi ada dua macam yaitu imunisasi pasif yang merupakan kekebalan bawaan pada anak sejak lahir dan imunisasi aktif dimana kekebalan didapat dari pemberian vaksin kepada anak melalui suntik atau tetes.

Kementerian Kesehatan menganjurkan agar semua anak-anak dapat memperoleh imunisasi secara lengkap. Anak yang mendapat imunisasi dasar lengkap akan terlindungi dari beberapa penyakit berbahaya dan akan mencegah penularan kepada orang disekitarnya. Jenis imunisasi yang wajib diberikan pada balita adalah BCG, DPT, Polio, Campak/Morbili dan Hepatitis B.

Tabel 2.3. Persentase Anak Umur 0-59 Bulan yang Pernah Diimunisasi Menurut Jenis Imunisasi, di Kabupaten Siak , Tahun 2016 dan 2017

Jenis	Tahun	
	2016	2017
(1)	(2)	(3)
BCG	92,61	87,98
DPT	85,10	84,58
Polio	89,11	89,93
Campak/Morbili	69,89	73,03
Hepatitis B	79,77	78,51

[Diolah dari Hasil Susenas]

Berdasarkan hasil Susenas 2017, persentase anak umur 0-59 bulan yang mendapatkan imunisasi wajib mencapai 46,66 persen. Persentase ini menurun jika dibandingkan tahun 2016 yang sebesar 54,76 persen. Jika dilihat tiap jenis imunisasinya, hanya imunisasi polio dan campak yang mengalami peningkatan persentase. Pada tahun 2017 ada sekitar 89,93 persen balita yang mendapat imunisasi polio meningkat dari tahun 2016 yang sebesar 89,11 persen. Besar harapan dengan adanya peningkatan ini, tidak ada lagi yang mengalami kelumpuhan akibat penyakit polio di Provinsi Riau terutama di Kabupaten Siak,. Akan tetapi, jumlah balita yang melakukan imunisasi BCG, DPT dan Hepatitis B mengalami penurunan. Oleh sebab itu diperlukan peran pemerintah untuk mensosialisasikan pentingnya imunisasi tersebut bagi kesehatan masyarakat secara umum.

Pemanfaatan Fasilitas Tenaga Kesehatan

Pada umumnya pemanfaatan fasilitas kesehatan oleh penduduk sangat erat terkait dengan kondisi sosial ekonomi penduduk di suatu daerah. Penduduk yang cenderung maju secara ekonomi akan lebih memilih berobat ke dokter atau tenaga kesehatan. Peningkatan perubahan sikap masyarakat yang lebih baik tersebut ditandai dengan banyaknya penduduk yang berobat ke fasilitas praktek dokter/bidan. Pada tahun 2016 yang berobat ke praktek dokter/bidan sebesar 23,13 persen meningkat menjadi 47,46 persen di tahun 2017. Meningkatnya jumlah penduduk yang berobat ke praktek dokter/bidan mengingat fasilitas yang mudah diakses dengan biaya yang relatif ringan dan kualitas yang baik. Sementara itu, penduduk yang berobat ke pengobatan tradisional juga mengalami peningkatan dari 1,70 persen pada tahun 2016 menjadi 5,22 persen pada tahun 2017.

Secara menyeluruh kondisi penduduk yang berobat ke pelayanan kesehatan dengan tenaga ahli kesehatan yang terlatih mengalami peningkatan yang sangat nyata dibandingkan dengan kondisi tahun-tahun sebelumnya. Terjadinya pergeseran dan perubahan penduduk yang berobat dari tenaga kesehatan yang kurang/ tidak terlatih/ tradisional menuju ke tenaga kesehatan yang terlatih secara medis memperlihatkan meningkatnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat secara keseluruhan akan pentingnya kesehatan, juga merupakan indikator meningkatnya kondisi sosial ekonomi suatu wilayah bahkan negara.

Berdasarkan data Susenas 2017, fasilitas kesehatan yang relatif lebih banyak dimanfaatkan penduduk untuk berobat jalan adalah praktek dokter/bidan (47,46 persen), Puskesmas/Pustu (28,58 persen) dan klinik/ praktek bersama (15,10 persen).

Tabel 2.4 Persentase Penduduk yang Berobat Jalan Selama Sebulan Terakhir Menurut Tempat Berobat di Kabupaten Siak, 2016 dan 2017

Tempat Berobat	2016	2017
(1)	(2)	(3)
RS Pemerintah	6,84	4,28
RS Swasta	5,88	6,32
Praktek Dokter/Bidan	23,13	47,46
Klinik/Praktek Dokter Bersama	29,14	15,10
Puskesmas/Pustu	24,74	28,58
UKBM*	10,77	4,22
Praktek Pengobatan Tradisional/Alternatif	1,70	5,22
Lainnya	0,00	0,00
% Penduduk yang Berobat Jalan	45,50	43,08

[Diolah dari Hasil Susenas]

Keterangan:

1. UKBM* terdiri dari Poseksdes, Polindes, Posyandu, Balai Pengobatan

BAB 3

KONDISI PENDIDIKAN KABUPATEN SIAK 2017

Rata-rata Lama Sekolah
Penduduk Usia 15+
9,4 Tahun



Ayo Sekolah



Angka Melek Huruf
98,77 %

8,98 % Penduduk Tidak
Memiliki Ijazah/STTB

ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH

100 % Penduduk Usia 7-12
Tahun Bersekolah

ANGKA PARTISIPASI MURNI

100 % Penduduk Usia 7-12
Tahun Bersekolah **SD**

7,23% Penduduk Usia 13-15
Tahun Tidak Bersekolah

78,33% Penduduk Usia 13-15
Tahun Bersekolah **SMP**

22,67% Penduduk Usia 16-18
Tahun Tidak Bersekolah

70,89% Penduduk Usia 16-18
Tahun Tidak Bersekolah
SMA



3. PENDIDIKAN

Pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia. Oleh sebab itu maka setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya. Hak memperoleh pendidikan bagi setiap warga negara tidak memandang status sosial, status ekonomi, suku, etnis, agama, dan gender. Hal tersebut sudah tertuang dalam UUD 1945. Pendidikan dasar sebagai bagian dari hak asasi manusia dan hak setiap warga negara, maka dalam usaha pemenuhannya harus direncanakan dan dijalankan dengan sebaik mungkin. Pemenuhan atas hak untuk mendapatkan pendidikan dasar yang layak dan bermutu merupakan ukuran keadilan dan pemerataan atas hasil pembangunan. Hal tersebut juga menjadi investasi sumber daya manusia yang diperlukan untuk mendukung keberlangsungan pembangunan bangsa.

Pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan diharapkan akan mampu menjadikan warga negara Indonesia memiliki kecakapan hidup sehingga mendorong tegaknya pembangunan manusia seutuhnya serta masyarakat madani dan modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana yang telah diamanatkan dalam UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Sebagai upaya untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, maka pemerintah pusat dan daerah harus memfasilitasi hak pendidikan bagi tiap warganya. Melalui sekolah yang terjangkau dari sisi pembiayaan, bermutu dari segi layanan dan berkualitas dari sisi pembelajaran. Selain pembiayaan pendidikan yang harus ditanggung pemerintah, sarana dan prasarana, kurikulum, dan sumber belajar dan daya dukung lainnya perlu diupayakan pemerintah. Beberapa indikator yang akan disajikan di dalam publikasi ini, diantaranya Angka Melek Huruf (AMH), Rata-rata Lama Sekolah, Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Putus Sekolah, Indikator-indikator tersebut diolah dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional yang dilakukan BPS.

Angka Melek Huruf (AMH)

Seseorang dikatakan melek huruf apabila paling tidak orang tersebut dapat menggunakan kemampuan baca dan tulis dengan huruf latin dan berhitung dengan angka arab dalam kegiatannya memerlukan kecakapan tersebut dan juga memungkinkannya untuk melanjutkan pemanfaatan kecakapan membaca, menulis dan berhitung untuk pengembangan diri dan masyarakat. Melek huruf sangat berkaitan erat dengan buta huruf. Semakin meningkatnya angka melek huruf menunjukkan semakin menurunnya angka buta huruf. Baik angka melek huruf maupun angka buta huruf dapat digunakan untuk melihat pencapaian keberhasilan program-program pemberantasan buta huruf.

Program pemberantasan buta huruf mempunyai tujuan untuk meningkatkan kemampuan membaca dan menulis dengan huruf latin dan berhitung serta berketrampilan. Dengan kemampuan yang dimiliki tersebut memungkinkan seseorang dapat memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari.

Selain itu, tujuan lain adalah menciptakan tenaga lokal yang potensial guna mengelola sumberdaya yang ada di lingkungannya. Bagi pendidikan persekolahan, diharapkan akan mampu menekan angka putus sekolah di pendidikan persekolahan.

Pada tahun 2017, terjadi penurunan Angka Melek Huruf (AMH) di Kabupaten Siak bila dibandingkan dengan tahun 2016. AMH turun dari 99,24 persen menjadi 98,77 persen. Penurunan yang terjadi tidak terlalu besar namun penurunan AMH menunjukkan bahwa terjadi kenaikan angka buta aksara masyarakat dan terjadi penurunan kualitas sumber daya manusia dari sisi pendidikan, walaupun minimal hanya dapat membaca dan menulis. Hal ini juga dapat mencerminkan keberhasilan program pemberantasan buta aksara yang telah dilakukan oleh pemerintah.

Program pemberantasan buta aksara harus terus dilakukan sehingga angka buta aksara masyarakat dapat terus ditekan dan semakin menurun tiap tahunnya. Pemerintah harus terus menumbuhkan semangat untuk memacu percepatan penurunan angka buta aksara dengan menggalang kerjasama dengan berbagai pihak, seperti dengan pemerintah daerah, perguruan tinggi, organisasi perempuan, organisasi keagamaan, dan swasta. Dengan adanya dukungan dari berbagai elemen masyarakat ini, memungkinkan angka buta aksara akan terus mengalami penurunan.

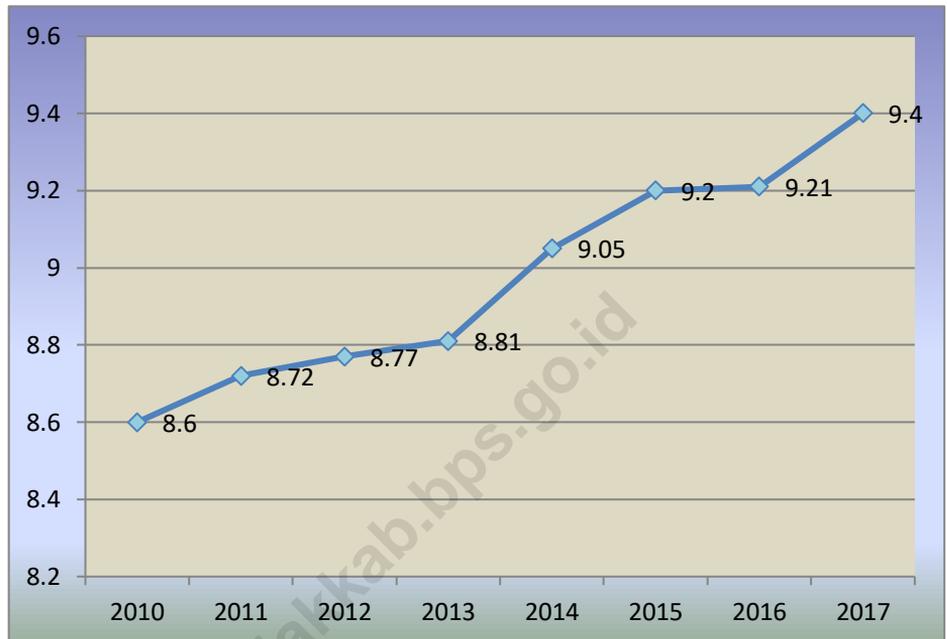
Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah merupakan indikator yang dapat digunakan untuk melihat kualitas penduduk dalam hal mengenyam pendidikan formal. Rata-rata lama sekolah itu sendiri mempunyai pengertian jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). Indikator rata-rata lama sekolah sangat penting karena digunakan sebagai salah satu ukuran untuk menghitung Indeks Pembangunan Manusia (IPM) khususnya di sektor pendidikan.

Sektor pendidikan sendiri menurut data IPM Indonesia yang dirilis oleh United Nation Development Program (UNDP) pada 2 November 2011 memberikan kontribusi sebanyak 0,58. Oleh karena itu sektor pendidikan memegang peranan penting dalam penghitungan IPM (<http://www.pikiran-rakyat.com/node/164932>).

Untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dalam sektor pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan menempuh berbagai upaya dengan meningkatkan waktu rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas. Salah satu upaya yang dilakukan adalah memperkecil angka putus sekolah dan meningkatkan jumlah angka yang melanjutkan antarjenjang pendidikan. Salah satu cara paling efektif untuk menaikkan waktu rata-rata lama sekolah bukan dengan menyekolahkan kembali penduduk Indonesia khususnya di Kabupaten Siak yang telah berusia lanjut, tetapi mengupayakan agar tidak ada lagi peserta didik yang putus sekolah.

Gambar 3.1 . Rata-rata Lama Sekolah (tahun)
di Kabupaten Siak Tahun 2010-2017



Sumber : BPS Provinsi Riau

Upaya lain yang dilakukan yaitu dengan meningkatkan akses dan mutu pendidikan anak usia dini (PAUD), meningkatkan partisipasi sekolah jenjang pendidikan dasar yang bermutu, meningkatkan akses dan mutu pendidikan menengah, meningkatkan akses dan daya saing pendidikan tinggi, serta meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan. Secara umum, rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas di Kabupaten Siak pada tahun 2017 sebesar 9,40 tahun. Hal ini berarti bahwa rata-rata penduduk di Kabupaten Siak baru mampu menempuh pendidikan sampai dengan kelas 3 SMP atau putus sekolah dikelas 3 SMP.

Tingkat Pendidikan

Kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari keahlian/keterampilan serta ilmu pengetahuan yang dimilikinya yang dapat digambarkan dari tingkat pendidikan yang ditamatkannya. Seseorang yang menamatkan pendidikannya hingga jenjang pendidikannya yang tinggi dapat mempunyai pengetahuan yang luas serta keterampilan/keahlian yang tinggi. Dengan semakin meningkatnya keterampilan/keahlian akan semakin mudah mendapatkan kesempatan untuk bekerja. Indikator tingkat pendidikan yang ditamatkan juga dapat digunakan untuk mengetahui keberhasilan program wajib belajar 9 tahun yang dicanangkan pemerintah. Pada tahun 2017, penduduk usia 15 tahun ke atas yang menamatkan sekolah pada jenjang pendidikan SMP ke atas mencapai 70,18 persen. Secara umum persentase penduduk yang tidak mempunyai ijazah pendidikan mencapai 8,98 persen. Hal ini menunjukkan ada kesadaran masyarakat bahwa pendidikan itu sangat penting yang akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Hal ini terlihat dari persentase penduduk yang tidak memiliki ijazah masih dibawah 10 persen.

Tabel 3.1 Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas Menurut Ijazah/STTB Tertinggi yang Dimiliki di Kabupaten Siak Tahun 2016-2017

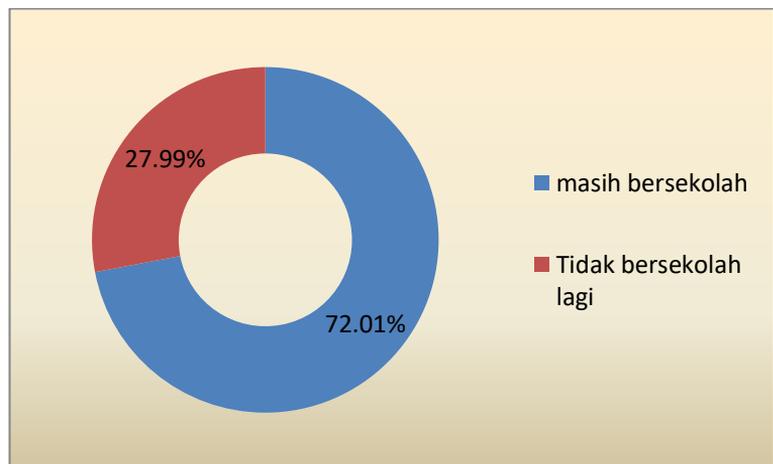
Ijazah/STTB Tertinggi yang Dimiliki	Tahun	
	2016	2017
Tidak memiliki	6,99	8,98
SD/MI/ Paket A	30,75	20,85
SMP/MTs/ Paket B	18,86	24,82
SMA/MA/ Paket C	32,58	30,28
SM Kejuruan	3,87	7,36
Diploma I dan II	0,27	0,54
Akademi / Diploma III	1,56	1,35
DIV/ S1/ S2/ S3	5,13	5,83
Jumlah	100,00	100,00

[Diolah dari Hasil Susenas]

Penduduk berumur 7-24 tahun merupakan cikal bakal generasi penerus bangsa yang seharusnya sedang berada dalam dunia pendidikan. Namun kondisi perekonomian terutama biaya pendidikan terkadang menghambat kemauan seseorang untuk bersekolah hingga jenjang yang lebih tinggi. Akan tetapi, tidak sedikit pula hambatan yang muncul sebenarnya bukan karena alasan biaya pendidikan, seperti motivasi, lingkungan, pergaulan, juga penyalahgunaan teknologi informasi.

Untuk wilayah Kabupaten Siak pada tahun 2017, persentase penduduk umur 7-24 tahun yang masih bersekolah menunjukkan kondisi yang relatif baik dengan capaian 72,01 persen (tanpa memerhatikan kesesuaian umur dan jenjang pendidikan yang dijalani). Akan tetapi, 27,99 persen sisanya sangat disayangkan berada dalam kondisi tidak bersekolah lagi. Kondisi ini tentu wajib menjadi perhatian khusus bersama, baik pemerintah dan masyarakat dalam rangka meningkatkan pendidikan di Bumi Melayu.

Gambar 3.2 Persentase Penduduk 7 -24 Tahun ke Atas Menurut Status Pendidikan di Kabupaten Siak, Tahun 2017



[Diolah dari Hasil Susenas]

Tingkat Partisipasi Sekolah

Tingkat partisipasi sekolah merupakan salah satu indikator yang dapat mengukur partisipasi masyarakat dalam mengikuti pendidikan dari berbagai jenjang pendidikan dan kelompok umur. Tingkat partisipasi sekolah yang dapat diukur diantaranya yaitu Angka Partisipasi Sekolah (APS) dan Angka Partisipasi Murni (APM). Pemerintah berharap agar kedua indikator selalu menunjukkan peningkatan setiap tahunnya pada setiap jenjang pendidikan. Hal ini dapat menunjukkan bahwa semakin banyak masyarakat memperoleh layanan pendidikan dasar dan menengah yang bermutu dan berkesetaraan.

Tabel 3.2 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Menurut Kelompok Umur di Kabupaten Siak, Tahun 2015- 2017

Kelompok Umur	Tahun		
	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)
7-12	96,88	99,15	100
13-15	97,97	92,33	92,77
16-18	86,69	84,16	77,33
19-24	12,78	22,82	19,61

Sumber : Susenas

Secara umum APS penduduk berumur 7-12 tahun sebesar 100 persen pada tahun 2017 atau mengalami peningkatan dari tahun 2016 yang sebesar 99,15 persen. Sedangkan APS penduduk berumur 13-15 tahun 2017 sebesar 92,77 persen atau mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang sebesar 92,33 persen. Sementara itu, APS penduduk berumur berumur 16-18 tahun mengalami penurunan dari 84,16 persen menjadi 77,33 persen.

Nilai APS yang tidak mencapai 100 menunjukkan masih adanya penduduk pada kelompok usia tertentu yang masih belum bersekolah. Semakin tinggi APS semakin besar jumlah penduduk yang mempunyai kesempatan untuk mengenyam pendidikan, namun bukan berarti meningkatnya APS juga meningkatnya pemerataan kesempatan masyarakat untuk mengenyam pendidikan.

Jika dilihat menurut jenis kelamin, APS penduduk perempuan terlihat lebih rendah bila dibandingkan penduduk laki-laki. APS penduduk perempuan tahun 2017 pada kelompok umur 7-12 tahun sebesar 100 persen sedangkan APS penduduk laki-laki sebesar 100 persen. Pada kelompok umur 13-15 tahun APS penduduk perempuan sebesar 94,67 persen dan penduduk laki-laki sebesar 90,76 persen. Sementara itu, pada kelompok umur 16-18 tahun, APS penduduk perempuan sebesar 72,73 persen dan APS penduduk laki-laki sebesar 82,65 persen. Perbedaan APS penduduk laki-laki dan perempuan menunjukkan adanya kesenjangan yang kecil. Secara umum, hal ini menunjukkan bahwa semakin meratanya pendidikan bagi penduduk baik laki-laki maupun perempuan.

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan persentase jumlah anak yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan. Pada tahun 2017 secara umum peningkatan APM hanya terjadi pada kelompok SD/Sederajat. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi dan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan dan menyekolahkan anak-anak mereka dengan tepat waktu belum sepenuhnya berjalan dengan baik.

Tabel 3.3 Angka Partisipasi Murni (APM) Penduduk Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Siak, Tahun 2016-2017

Jenjang Pendidikan	Tahun					
	2016			2017		
	Jenis Kelamin					
	L	P	L+P	L	P	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
SD	98,02	96,87	97,48	100	100	100
SMP	85,02	73,93	78,73	79,12	77,58	78,33
SMA	75,38	68,00	71,83	71,76	70,14	70,89

Sumber : Susenas

APM SD pada tahun 2017 sebesar 100 persen atau mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2016 yaitu sebesar 97,48 persen. Namun APM SMP mengalami penurunan dari 78,73 persen menjadi 78,33 persen. Sejalan dengan APM SMP, untuk APM SMA mengalami penurunan dari 71,83 persen menjadi 70,89 persen. Pada tahun 2017, dilihat menurut jenis kelamin, APM SMP dan APM SMA laki-laki terlihat lebih tinggi bila dibandingkan APM SMP dan APM SMA perempuan. APM SD penduduk laki-laki sebesar 100 sama dengan perempuan yang sebesar 100 persen. Kondisi berbeda terjadi pada APM SMP dan APM SMA. APM SMP penduduk perempuan tercatat sebesar 77,58 persen dan penduduk laki-laki sebesar 79,12 persen. Pada jenjang pendidikan SMA, APM penduduk perempuan sebesar 70,14 persen berbanding 71,76 persen (APM SMA penduduk laki-laki). Artinya persentase jumlah anak perempuan yang sedang bersekolah pada jenjang SMP dan SMA lebih rendah dari pada jumlah anak laki-laki yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan.

BAB 4

KETENAGAKERJAAN
KABUPATEN SIAK 2017

"208,43 ribu
Penduduk Siak
usia 15+
termasuk
Angkatan Kerja"



TPT
5,6 %

"5,6 %
Penduduk yang
Termasuk
Angkatan Kerja
adalah
Pengangguran"



4. KETENAGAKERJAAN

Salah satu masalah terbesar yang menjadi perhatian pemerintah adalah permasalahan di bidang ketenagakerjaan. Masalah ketenagakerjaan merupakan masalah yang sangat sensitif yang harus diselesaikan dengan berbagai pendekatan agar masalah tersebut tidak meluas yang berdampak pada penurunan kesejahteraan dan keamanan masyarakat. Tingginya tingkat pengangguran, rendahnya perluasan kesempatan kerja yang terbuka, rendahnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja, serta masalah pekerja anak merupakan sebagian kecil dari berbagai masalah yang dihadapi pemerintah.

Tingginya tingkat pengangguran, rendahnya perluasan kesempatan kerja yang terbuka, rendahnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja merupakan permasalahan yang dihadapi pemerintah.

Data dan informasi ketenagakerjaan sangat penting bagi penyusunan kebijakan, strategi dan program ketenagakerjaan dalam rangka pembangunan nasional dan pemecahan masalah ketenagakerjaan. Kebijakan, strategi dan program ketenagakerjaan yang baik dan benar sangat ditentukan oleh kondisi ketersediaan data dan informasi ketenagakerjaan. Selain itu, data dan informasi mengenai ketenagakerjaan juga dapat mencerminkan tingkat pencapaian pembangunan yang telah dilaksanakan.

Bab ini menjelaskan beberapa indikator yang dapat digunakan untuk menggambarkan kondisi ketenagakerjaan. Sumber data penghitungan indikator ini diperoleh dari Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS). Indikator tersebut, antara lain Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK),

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), persentase pengangguran menurut tingkat pendidikan, persentase penduduk yang bekerja menurut status pekerjaan, persentase penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha dan jumlah jam kerja, persentase pekerja anak, serta persentase pekerja menurut kelompok upah/gaji/pendapatan bersih.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator ketenagakerjaan yang penting yang digunakan untuk menganalisa dan mengukur capaian hasil pembangunan. TPAK digunakan untuk mengukur besarnya jumlah angkatan kerja. Indikator ini merupakan rasio antara jumlah angkatan kerja dengan jumlah penduduk usia kerja (usia produktif 15 tahun ke atas). Selain TPAK, dalam analisis angkatan kerja juga dikenal indikator yang biasa digunakan untuk mengukur pengangguran yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Pengangguran terbuka didefinisikan sebagai orang yang sedang mencari pekerjaan atau yang sedang mempersiapkan usaha atau juga yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin lagi mendapatkan pekerjaan, termasuk juga mereka yang baru mendapat kerja tetapi belum mulai bekerja.

Pengangguran terbuka tidak termasuk orang yang masih sekolah atau mengurus rumah tangga, sehingga hanya orang yang termasuk angkatan kerja saja yang merupakan pengangguran terbuka. TPT dapat mencerminkan besarnya jumlah penduduk dalam kategori usia kerja yang termasuk dalam pengangguran.

Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang termasuk angkatan kerja di Kabupaten Siak pada Agustus 2017 mencapai 208,43 ribu orang, bertambah secara absolut sebanyak 30,1 ribu orang dibanding Agustus 2015 (178,33 ribu orang). Kenaikan jumlah angkatan kerja pada periode yang sama ternyata diiringi dengan kenaikan persentase TPAK. Persentase TPAK mengalami peningkatan sebesar 60,57 persen (Agustus 2015) menjadi 66,56 persen pada bulan Agustus 2017, yang artinya kenaikan jumlah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) diiringi dengan kenaikan penduduk yang termasuk angkatan kerja.

Tabel 4.1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Daerah Tempat Tinggal Di Kabupaten Siak, Tahun 2015-2017

Tahun	TPT			TPAK		
	L	P	L+P	L	P	L+P
2015	7,82	15,55	10,02	83,66	35,76	60,57
2016	-	-	-	-	-	-
2017	3,75	9,41	5,60	86,45	45,22	66,56

Sumber : SAKERNAS

Bila dilihat berdasarkan jenis kelamin, TPAK Tahun 2017 perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki masing-masing sebesar 45,22 persen dan 86,45 persen. Jika dibandingkan dengan tahun 2015, persentase TPAK perempuan mengalami kenaikan sebesar 9,46 persen, dan TPAK laki-laki juga mengalami kenaikan sebesar 2,79 persen. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk usia kerja laki-laki lebih banyak terlibat aktif di dunia kerja dibandingkan dengan penduduk usia kerja perempuan.

Hal ini terjadi karena penduduk perempuan lebih memilih untuk memiliki bekal pendidikan yang tinggi sebelum terjun ke dunia kerja, sedangkan penduduk laki-laki dapat langsung aktif di dunia kerja karena menjadi tulang punggung keluarga.

Lapangan Usaha dan Status Pekerjaan Utama

Lapangan usaha pertanian merupakan lapangan usaha yang yang mampu menyerap tenaga kerja lebih besar. Hal ini terkait dengan luasnya areal pertanian yang dimiliki kabupaten Siak. Pada tahun 2017, sebanyak 41,13 persen penduduk yang bekerja berusaha di usaha pertanian, meningkat dibandingkan tahun 2015 yang sebesar 36,36 persen. Sementara itu, penduduk yang bekerja di lapangan usaha industri pengolahan mengalami peningkatan dari 9,95 persen di tahun 2015 menjadi 14,80 persen di tahun 2017. Hal tersebut menunjukkan terjadinya pergeseran komposisi tenaga kerja dan relatif banyak yang beralih ke lapangan usaha industri pengolahan, setidaknya dapat diartikan bahwa lapangan usaha ini mampu memberikan lapangan kerja yang lebih luas atau tingkat kesempatan kerja yang relatif lebih besar.

Tabel 4.2. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama di Kabupaten Siak, 2015 dan 2017

Kelompok Usaha	Tahun	
	2015	2017
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	36,36	41,13
Perdagangan	17,22	15,96
Industri Pengolahan	9,95	14,80
Konstruksi	7,31	4,97
Jasa Kemasyarakatan, Sosial/Perorangan	18,43	18,83
Lainnya	10,74	4,30

[Diolah dari Data Sakernas]

Pola proporsi status pekerjaan utama penduduk yang bekerja di Kabupaten Siak pada periode 2015-2017 didominasi oleh penduduk bekerja dengan upah/gaji. Pada tahun 2015, total penduduk Kabupaten Siak yang bekerja dengan upah/gaji sebesar 55,97 persen. Sementara itu, pada tahun 2017 terjadi penurunan menjadi 52,80 persen. Penduduk yang bekerja dengan upah/gaji merupakan persentase pekerja terbesar sepanjang tahun 2015 dan 2017. Dari pola tersebut menggambarkan bahwa kurangnya minat penduduk untuk menjadi pengusaha. Untuk itu perlu dikembangkan usaha ekonomi kreatif, dimana dapat menambah lapangan pekerjaan sehingga tidak bergantung pada upah/gaji yang sewaktu-waktu bisa dihentikan jika terjadi kebangkrutan pada perusahaan.

Tabel 4.3. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan di Kabupaten Siak, 2015 dan 2017

Status Pekerjaan Utama	2015	2017
(1)	(2)	(3)
Penduduk Bekerja dengan Upah/gaji (buruh/karyawan/pegawai)	55,97	52,80
Berusaha/Wiraswasta	39,98	39,04
Pengusaha	14,50	9,93
Berusaha sendiri + Berusaha dibantu buruh tidak tetap	11,51	16,38
Pekerja bebas	13,98	12,73
Pekerja Keluarga	4,04	8,16
Total	100,00	100,00

[Diolah dari Data Sakernas]

Setiap orang selalu berharap dirinya akan mudah mendapatkan pekerjaan layak yang sesuai dengan keahlian yang dia miliki serta tingkat pendidikan yang ditamatkan. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang akan berdampak pada semakin tinggi pula harapan dan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan tingkat pendidikannya.

Namun, keterbatasan lapangan kerja yang tersedia bagi mereka yang mempunyai ijazah tinggi menyebabkan mereka tidak terserap pada lapangan usaha tersebut. Sebagian besar dari mereka yang merupakan lulusan pendidikan tinggi enggan menerima pekerjaan yang tidak sesuai dengan jenis keahlian dan jenjang pendidikan yang telah ia tamatkan. Sehingga sebagian dari mereka yang tidak mendapatkan pekerjaan menjadi penganggur.

BAB 5. TARAF DAN POLA KONSUMSI



92,3 % Pengeluaran perkapita penduduk diatas 500 ribu rupiah

51,25 %
pengeluaran untuk
kebutuhan
MAKANAN



48,75 %
pengeluaran
untuk kebutuhan
NON MAKANAN





5. TARAF DAN POLA KONSUMSI

Pola konsumsi rumah tangga merupakan salah satu indikator kesejahteraan rumah tangga. Selama ini berkembang pengertian bahwa besar proporsi pengeluaran untuk konsumsi makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga dapat memberikan gambaran kesejahteraan rumah tangga tersebut. Rumah tangga dengan proporsi pengeluaran yang lebih besar untuk konsumsi makanan mengindikasikan rumah tangga tersebut berpenghasilan rendah. Makin tinggi penghasilan rumah tangga, maka makin kecil proporsi pengeluaran untuk makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga. Dengan kata lain rumah tangga cenderung semakin sejahtera bila persentase pengeluaran untuk makanan jauh lebih kecil dibandingkan persentase pengeluaran untuk non makanan.

Pengeluaran Rumah Tangga

Pengeluaran rumah tangga dibedakan menurut kelompok makanan dan bukan makanan. Perubahan pendapatan seseorang akan berpengaruh pada pergeseran pola pengeluaran. Semakin tinggi pendapatan, cenderung akan semakin tinggi pengeluaran untuk bukan makanan. Pergeseran pola pengeluaran terjadi karena elastisitas permintaan terhadap makanan pada umumnya rendah, sebaliknya elastisitas permintaan terhadap barang bukan makanan pada umumnya tinggi.

Keadaan ini jelas terlihat pada kelompok penduduk yang tingkat konsumsinya sudah mencapai titik jenuh, sehingga peningkatan pendapatan akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan bukan makanan atau ditabung. Dengan demikian, pola pengeluaran dapat digunakan sebagai salah satu alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk, dimana perubahan komposisinya digunakan sebagai petunjuk perubahan tingkat kesejahteraan.

Tabel 5.1. Rata-Rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut Jenis Pengeluaran di Kabupaten Siak, Tahun 2016 dan 2017

Jenis Pengeluaran	Rata-rata Pengeluaran Per Kapita/Bulan			
	Nominal (Rp)		Persentase (%)	
	2016	2017	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Makanan	566.968	603.778	49,18	51,25
Bukan Makanan	585.886	574.397	50,82	48,75
Siak	1.152.854	1.178.175	100,00	100,00

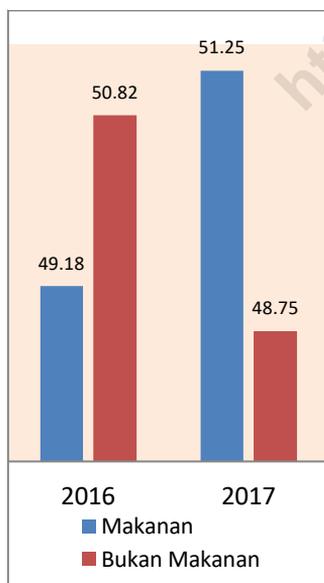
[Diolah dari Hasil Susenas]

Tabel 5.1 menyajikan data pengeluaran rata-rata per kapita sebulan untuk makanan dan bukan makanan 2016 dan 2017. Dari tabel tersebut terlihat bahwa selama periode 2016-2017 rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk meningkat dari Rp 1.152.854,- menjadi Rp 1.178.175,-. Bila dilihat persentasenya pengeluaran untuk Bukan makanan mengalami penurunan dari 50,82 persen pada tahun 2016 menjadi 48,75 persen pada tahun 2017. Sebaliknya, pengeluaran untuk makanan meningkat dari 49,18 persen menjadi 51,25 persen. Hal ini mengindikasikan belum adanya peningkatan kesejahteraan, artinya orientasi pengeluaran untuk makanan masih tinggi sehingga konsumsi non makanan yang terdiri dari perumahan, aneka barang dan jasa, pakaian, barang tahan lama lainnya dan lain-lain belum menjadi prioritas.

Tabel 5.2. Rata-Rata Pengeluaran per Kapita/bulan Menurut Golongan Pengeluaran (Rupiah) di Kabupaten Siak, 2016 dan 2017

Golongan Pengeluaran per Kapita	Tahun	
	2016	2017
(1)	(2)	(3)
<200.000	0,00	0,00
200.000 - 299.999	0,00	0,82
300.000 - 499.999	8,95	6,88
500.000 - 749.999	26,39	21,82
750.000 - 999.999	15,87	19,17
1.000.000 - 1.499.999	27,17	29,19
>= 1.500.000	21,62	22,12
Total	100	100

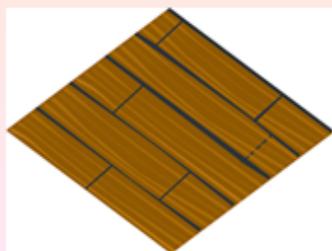
Gambar 5.1. Persentase Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut Jenis Pengeluaran di Kabupaten Siak Tahun 2016 dan 2017



[Diolah dari Hasil Susenas]

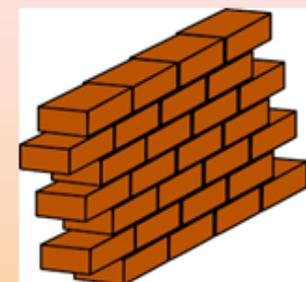
Peningkatan pendapatan idealnya diikuti dengan pemerataan pendapatan, karena pemerataan pendapatan merupakan salah satu strategi dan tujuan pembangunan nasional Indonesia. Ketimpangan dalam menikmati hasil pembangunan di antara kelompok penduduk dikhawatirkan akan menimbulkan masalah-masalah sosial. Tidak tersedianya data pendapatan menyebabkan penghitungan distribusi pendapatan menggunakan data pengeluaran sebagai *proxy* pendapatan. Walaupun dilakukan dengan menggunakan pendekatan pengeluaran, paling tidak dapat digunakan sebagai petunjuk untuk melihat arah dari perkembangan yang terjadi.

BAB 6 Perumahan Dan Lingkungan



99,22 %
Lantai
Bukan
Tanah

100% Atap
terbuat
dari beton,
genteng,
Sirap
seng,
Asbes



97,8 %
Dinding
terluas
Tembok
dan Kayu



99,21 % Sumber
Penerangan
Listrik



AirKu

87,57 % Penduduk
mengonsumsi Air
Bersih



96,41 %
Penduduk
memiliki
jamban
sendiri



6. PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN

Rumah dan kelengkapannya merupakan kebutuhan dasar dan juga merupakan faktor penentu indikator kesejahteraan rakyat. Rumah mempunyai pengaruh terhadap pembinaan watak dalam kepribadian serta merupakan faktor penting terhadap produktivitas kerja dan kreativitas kerja seseorang. Selain itu rumah juga mempunyai fungsi strategis sebagai pusat pendidikan keluarga, persemaian budaya, dan peningkatan kualitas generasi yang akan datang. Dengan meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat melalui pemenuhan kebutuhan papan maka akan terwujud kesejahteraan rakyat.

UU No. 1 Tahun 2011 menyebutkan salah satu tujuan diselenggarakannya perumahan dan kawasan permukiman yaitu untuk menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan.

Rumah juga merupakan sarana pengamanan dan pemberi ketentraman hidup bagi manusia. Dalam fungsinya sebagai pengamanan diri bukan berarti menutup diri tetapi harus membuka diri menyatu dengan lingkungannya. Kualitas lingkungan rumah tinggal mempengaruhi terhadap status kesehatan penghuninya. Kualitas rumah tinggal yang baik dalam lingkungan sehat, aman, lestari dan berkelanjutan (Kepmen no.9 tahun 1999) diartikan sebagai suatu kondisi rumah yang memenuhi standard minimal dari segi kesehatan, sosial, budaya, ekonomi, dan kualitas teknis.

Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Pemukiman sebagai pengganti dari Undang-Undang No. 4 tahun 1992 mencantumkan bahwa salah satu tujuan diselenggarakannya perumahan dan kawasan permukiman yaitu untuk menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan

terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan. Definisi perumahan itu sendiri merupakan kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan fasilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni. Rumah selain sebagai tempat tinggal, juga dapat menunjukkan status sosial seseorang. Status sosial seseorang berhubungan positif dengan kualitas/kondisi rumah. Semakin tinggi status sosial seseorang semakin besar peluang untuk memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal dengan kualitas yang lebih baik.

Salah satu dari sekian banyak fasilitas yang dapat mencerminkan kesejahteraan rumah tangga adalah kualitas material seperti jenis atap, dinding dan lantai terluas yang digunakan, termasuk juga fasilitas penunjang lain yang meliputi luas lantai hunian, sumber air minum, fasilitas tempat buang air besar, dan sumber penerangan. Kualitas perumahan yang baik dan penggunaan fasilitas perumahan yang memadai akan memberikan kenyamanan bagi penghuninya.

Kualitas Rumah Tinggal

Rumah tinggal yang dapat dikategorikan ke dalam rumah yang layak huni sebagai tempat tinggal harus memenuhi beberapa kriteria kualitas rumah tempat tinggal. Beberapa diantaranya yaitu rumah yang memiliki dinding terluas yang terbuat dari tembok atau kayu, dengan beratapkan beton, genteng, sirap, seng maupun asbes, dan memiliki lantai terluas bukan tanah. Berdasarkan data Susenas 2017, persentase rumah tangga yang bertempat tinggal di rumah yang berlantai bukan tanah menunjukkan adanya peningkatan, walaupun peningkatan tersebut tidak terlalu tinggi yaitu sebesar 99,22 persen atau meningkat bila dibandingkan pada tahun 2016 yang sebesar 98,36 persen.

Pada tahun 2017 persentase rumah tangga yang bertempat tinggal di rumah yang berlantai bukan tanah mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Jika dilihat menurut daerah tempat tinggal, walaupun sebagian besar rumah tangga sudah menghuni rumah dengan berlantaikan bukan tanah, namun masih terdapat rumah tangga yang bertempat tinggal di rumah berlantaikan tanah yaitu sebesar 0,55 persen.

Indikator lain yang digunakan untuk melihat kualitas perumahan untuk rumah tinggal adalah penggunaan atap dan dinding terluas. Pada tahun 2017, kualitas rumah yang beratap layak telah mencapai 100 persen, atau mengalami peningkatan bila dibandingkan tahun 2016 yang sebesar 99,13 persen. Selanjutnya pada tahun yang sama, kualitas rumah dengan dinding terluas dari tembok dan kayu mencapai 97,80 persen, atau mengalami penurunan dari tahun 2016 yang sebesar 99,93 persen.

Tabel 6.1 Rumah Tangga Menurut Beberapa Indikator Kualitas Perumahan Di Kabupaten Siak, Tahun 2016 dan 2017

Indikator Kualitas Perumahan	Tahun	
	2016	2017
(1)	(2)	(3)
Lantai bukan tanah (%)	98,36	99,22
Atap beton, genteng, sirap, seng dan asbes (%)	99,13	100
Dinding tembok dan kayu (%)	99,93	97,80

[Diolah dari Hasil Susenas]

Menurut Badan Kesehatan Dunia (WHO) salah satu kriteria rumah sehat adalah rumah tinggal yang memiliki luas lantai per orang minimal 10 m². Sedangkan menurut Ketentuan Rumah Sederhana Sehat (Rs Sehat) Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah adalah kebutuhan ruang per orang dihitung berdasarkan aktivitas dasar manusia di dalam rumah. Aktivitas seseorang tersebut meliputi aktivitas tidur, makan, kerja, duduk, mandi, kakus, cuci dan masak serta ruang gerak lainnya.

Dari hasil kajian, kebutuhan ruang per orang adalah 9 m² dengan perhitungan ketinggian rata-rata langit-langit adalah 2,80 m. Menurut Kementerian Kesehatan, rumah dapat dikatakan memenuhi salah satu persyaratan sehat adalah jika penguasaan luas lantai per kapitanya minimal 8 m² (BPS, 2001). Pada tahun 2017 luas tempat tinggal cenderung didominasi pada kelompok luas 50-99 m² sebanyak 48,00 persen atau meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar 47,79 persen.

Namun demikian, terdapat penurunan pada persentase rumah tangga yang menempati luas tempat tinggal pada kelompok luas dibawah 20 m² dari 1,45 persen pada tahun 2016 menurun menjadi 0,97 persen pada tahun 2017. Selain itu pada kelompok luas tempat tinggal 20-49 m², menurun dari 35,75 persen pada tahun 2016 menjadi 31,46 persen pada tahun 2017.

Fasilitas Rumah Tinggal

Kualitas dan kenyamanan rumah tinggal ditentukan oleh kelengkapan fasilitas suatu rumah tinggal . Yang termasuk dalam kelengkapan fasilitas tersebut adalah tersedianya air bersih, sanitasi yang layak, serta penerangan yang baik. Air bersih merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi rumah tangga dalam kehidupan

sehari-hari. Ketersediaan dalam jumlah yang cukup terutama untuk keperluan minum dan masak merupakan tujuan dari program penyediaan air bersih yang terus menerus diupayakan pemerintah.

Pada tahun 2017, rumah tangga di Kabupaten Siak yang menggunakan air kemasan, air isi ulang, dan air ledeng sebagai sumber air minum dan masak mencapai 68,3 persen, meningkat dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 66,88 persen. Kemudian, besarnya persentase rumah tangga yang menggunakan air minum bersih pada tahun 2017 telah mencapai 87,57 persen. Angka ini sedikit meningkat dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 78,07 persen.

Tabel 6.2. Persentase Rumah Tangga Menurut Beberapa Fasilitas Perumahan, Di Kabupaten Siak, 2016 dan 2017

Fasilitas Perumahan	Tahun	
	2016	2017
(1)	(2)	(3)
Sumber Minum Utama Air kemasan, air isi ulang & ledeng	66,88	68,3
Air minum Bersih ¹⁾	78,07	87,57
Jamban sendiri	94,73	96,41
Tempat Pembuangan Akhir Tinja berupa Tanki/SPAL	86,11	92,40
Sumber penerangan Listrik	99,44	99,21

[Diolah dari Hasil Susenas]

Catatan: ¹⁾ Air yang bersumber dari ledeng, air kemasan, serta pompa, sumur terlindung dan mata air terlindung yang jarak ke tempat pembuangan limbah (tangki septik) > 10 m

Penyediaan sarana jamban merupakan bagian dari usaha sanitasi yang cukup penting peranannya. Jika ditinjau dari sudut kesehatan lingkungan, pembuangan kotoran manusia yang tidak saniter akan mencemari lingkungan terutama tanah dan sumber air. Selain itu juga akan menyebabkan berbagai macam penyakit seperti thypus, disentri, kolera, dan sebagainya. Untuk mencegah dan mengurangi kontaminasi terhadap lingkungan maka pembuangan kotoran manusia harus dikelola dengan baik sesuai dengan ketentuan jamban yang sehat. Fasilitas rumah tinggal yang berkaitan dengan hal tersebut adalah ketersediaan jamban sendiri dengan tangki septik.

Selama tahun 2016-2017 persentase rumah tangga yang memiliki jamban sendiri meningkat dari 94,73 persen menjadi 96,41 persen. Kebutuhan akan jamban sendiri sudah menjadi suatu kebutuhan yang harus dipenuhi oleh rumah tangga. Disamping itu, tempat pembuangan akhir tinja juga mempengaruhi faktor kesehatan masyarakat. Adanya Tanki septik juga merupakan bagian dari kualitas kehidupan bagi rumah tangga dalam memenuhi salah satu kriteria rumah sehat. Pada tahun 2017 rumah tangga yang menggunakan tangki septik sudah mencapai 92,40 persen atau mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 86,11 persen.

Fasilitas perumahan lainnya yang juga penting adalah penerangan. Sumber penerangan yang ideal adalah yang berasal dari listrik (PLN dan Non PLN), karena cahaya listrik lebih terang dibandingkan sumber penerangan lainnya. Berdasarkan hasil Susenas tahun 2017, sebesar 99,21 persen rumah tangga telah menikmati fasilitas penerangan listrik, menurun jika dibandingkan dengan tahun 2016 yang sebesar 99,44 persen.

Status Kepemilikan Rumah Tinggal

Rumah tangga yang menempati rumah milik sendiri dapat dikatakan telah mampu memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal yang terjamin dan permanen dalam jangka panjang.

Salah satu indikator yang digunakan untuk melihat tingkat kesejahteraan dan juga peningkatan taraf hidup masyarakat adalah status kepemilikan rumah tinggal. Kondisi ekonomi rumah tangga sangat berpengaruh terhadap kepemilikan rumah tinggal. Status kepemilikan rumah tinggal yang dicakup di sini adalah rumah milik sendiri, kontrak, sewa, bebas sewa, rumah dinas, rumah milik orang tua/saudara atau status kepemilikan lainnya. Rumah tangga yang menempati rumah milik sendiri dapat dikatakan telah mampu memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal yang terjamin dan permanen dalam jangka panjang.

Tabel 6.3 Persentase Rumah Tangga Menurut Beberapa Fasilitas Perumahan, Di Kabupaten Siak, 2016 dan 2017

Status Kepemilikan Rumah Tinggal	Tahun	
	2016	2017
(1)	(2)	(3)
Milik Sendiri	66,42	62,75
Kontrak/sewa	17,75	15,42
Bebas Sewa	6,42	6,83
Rumah Dinas, lainnya	9,41	15,00

[Diolah dari Hasil Susenas]

Berdasarkan hasil Susenas 2017, rumah tangga yang menempati rumah milik sendiri sebesar 62,75 persen, sisanya 37,25 persen adalah bukan milik sendiri. Rumah tangga yang menempati rumah bukan milik sendiri terdiri dari 15,42 persen kontrak/ sewa, 6,83 persen bebas sewa, 15 persen rumah dinas dan lainnya.

Daftar Pustaka

- 2017 **Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Riau 2017**
(Berdasarkan Data Susenas 2017)
Pekanbaru : Badan Pusat Statistik Provinsi Riau
- 2017 **Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Riau 2016**
(Berdasarkan Data Susenas 2016)
Pekanbaru : Badan Pusat Statistik Provinsi Riau
- 2017 **Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Siak 2017**
(Berdasarkan Data Susenas 2017)
Siak Sri Indrapura : Badan Pusat Statistik Kabupaten Siak
- 2017 **Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Siak 2016**
(Berdasarkan Data Susenas 2016)
Siak Sri Indrapura : Badan Pusat Statistik Kabupaten Siak
- 2010 **Proyeksi Penduduk Provinsi Riau 2010-2020**
Jakarta: Badan Pusat Statistik
- 2017 **Keadaan Angkatan Kerja Di Riau Agustus 2017**
Pekanbaru : Badan Pusat Statistik – Provinsi Riau
- 2015 **Keadaan Angkatan Kerja Di Riau Agustus 2015**
Pekanbaru : Badan Pusat Statistik – Provinsi Riau

Istilah Teknis

Air Minum Bersih

Air yang bersumber dari ledeng, air kemasan, serta pompa, sumur terlindung dan mata air terlindung yang jarak ke tempat pembuangan limbah (septic tank) > 10 meter.

Angka Beban Tanggungan

Angka yang menyatakan perbandingan antara penduduk usia tidak produktif (di bawah 15 tahun dan 65 tahun ke atas) dengan penduduk usia produktif (antara 15 sampai 64 tahun) dikalikan 100.

Angka Harapan Hidup pada waktu Lahir

Perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur.

Angka Kematian Bayi

Probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun (dinyatakan dengan per seribu kelahiran hidup).

Angka Kelahiran Menurut Umur (ASFR)

Banyaknya kelahiran per seribu wanita dari golongan umur 15-49 tahun yang terjadi pada waktu tertentu.

Angka Kelahiran Total

Banyaknya anak yang diperkirakan dilahirkan oleh wanita selama masa reproduksi dengan anggapan bahwa perilaku kelahirannya mengikuti pola kelahiran tertentu tanpa memperhitungkan angka kelangsungan hidup wanita.

Angka Kelahiran Kasar

Angka yang menunjukkan banyaknya kelahiran untuk setiap seribu penduduk yang terjadi di suatu daerah pada waktu tertentu.

Angka Kesakitan

Persentase penduduk yang mengalami keluhan kesehatan hingga mengganggu aktivitas sehari-hari.

Angka Melek Huruf

Proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis dalam huruf latin atau lainnya.

Angka Partisipasi Sekolah

Rasio anak yang sekolah pada kelompok umur tertentu terhadap jumlah penduduk pada kelompok umur yang sama.

Angka Putus Sekolah

Proporsi anak usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu.

Angka Partisipasi Murni

Proporsi anak sekolah pada satu kelompok umur tertentu yang bersekolah tepat pada tingkat yang sesuai dengan kelompok umurnya.

Angkatan Kerja

Penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan yang mencari pekerjaan.

Bekerja

Melakukan kegiatan/pekerjaan dengan maksud untuk memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan dan lamanya bekerja paling sedikit satu jam terus-menerus dalam seminggu yang lalu (termasuk pekerja keluarga tanpa upah yang membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi). Mereka yang mempunyai pekerjaan tetap tetapi sementara tidak bekerja dianggap sebagai bekerja.

Indeks Gini

Ukuran pemerataan pendapatan yang dihitung berdasarkan kelas pendapatan. Nilai Koefisien Gini terletak antara nol yang mencerminkan pemerataan sempurna dan satu yang menggambarkan ketidakmerataan sempurna.

Jumlah Jam Kerja Seluruhnya

Jumlah jam kerja yang digunakan untuk bekerja (tidak termasuk jam kerja istirahat resmi dan jam kerja yang digunakan untuk hal-hal diluar pekerjaan).

Lapangan Usaha

Bidang kegiatan dari pekerjaan/tempat bekerja dimana seseorang bekerja. Kegiatan ini mengacu pada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dalam satu digit.

Masih Bersekolah

Sedang mengikuti pendidikan di pendidikan dasar, menengah atau tinggi

Penduduk Usia Kerja

Penduduk yang berumur 15 tahun ke atas.

Penganggur

Mereka yang termasuk dalam angkatan kerja dan tidak bekerja tetapi mencari pekerjaan.

Pengangguran Terbuka

Mereka yang termasuk pengangguran terbuka adalah :

- yang mencari pekerjaan
- yang mempersiapkan usaha
- yang tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan
- yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

Pengeluaran

Pengeluaran untuk makanan dan bukan makanan. Makanan mencakup seluruh jenis makanan termasuk makanan jadi, minuman, tembakau dan sirih. Bukan makanan mencakup perumahan, sandang, biaya kesehatan, sekolah, dan sebagainya.

Pekerja Tidak Dibayar

seseorang yang bekerja membantu usaha untuk memperoleh penghasilan/keuntungan yang dilakukan oleh salah seorang anggota rumah tangga atau bukan anggota rumah tangga tanpa mendapat gaji

Perkotaan

Karakteristik sosial ekonomi dari wilayah administratif terkecil. Wilayah ini dikatakan sebagai perkotaan jika memenuhi persyaratan tertentu dalam hal kepadatan penduduk, lapangan kegiatan ekonomi utama, fasilitas-fasilitas perkotaan (jalan raya, sarana pendidikan formal, sarana kesehatan umum, dan sebagainya).

Secara operasional penentuan daerah perkotaan dibuat dengan sistim skoring tertentu. Prosedur penentuan daerah perkotaan berlaku sejak tahun 1980 dan masih berlaku hingga saat ini.

Peserta Keluarga Berencana (Akseptor)

Orang yang mempraktekkan salah satu metode kontrasepsi.

Rasio Jenis Kelamin

Perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan di satu daerah pada waktu tertentu.

Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani.

Status Pekerjaan

Kedudukan seseorang dalam unit usaha/kegiatan dalam melakukan pekerjaan.

Tamat Sekolah

Menyelesaikan pelajaran pada kelas atau tingkat terakhir suatu jenjang sekolah di sekolah negeri maupun swasta dengan mendapatkan tanda tamat ijazah. Orang yang belum mengikuti pelajaran pada kelas tertinggi tetapi telah mengikuti ujian dan lulus dianggap tamat sekolah.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Persentase angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja.

Tingkat Pertumbuhan Penduduk

Angka yang menunjukkan tingkat pertambahan penduduk per tahun dalam jangka waktu tertentu. Angka ini dinyatakan sebagai persentase

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

<https://siakkab.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN SIAK**

Komplek Perkantoran Sungai Betung
Siak Sri Indrapura, 28671
Telp/Fax (0764) 8001052. Email: bps1405@bps.go.id
Homepage: <https://siakkab.bps.go.id>

ISSN 1405-0188



9 771405 018198 >